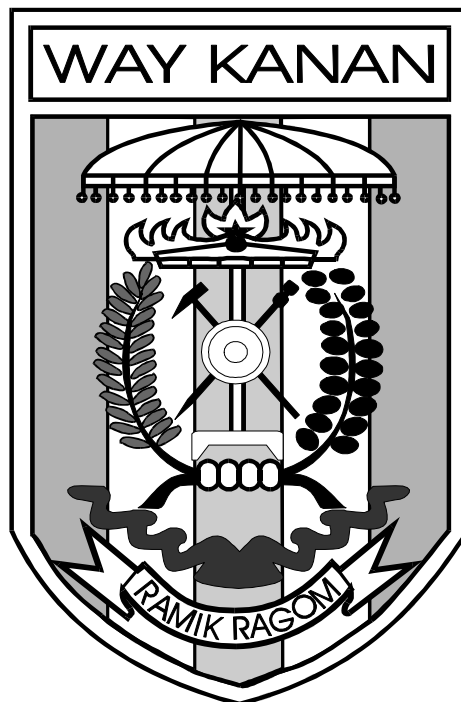


LAPORAN LKJIP TAHUN 2023



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN WAY KANAN

JL. WIDANA ALI DUKI NO. 02 Telp. (0723) 461149 dan FAXS. (0723) 461036
EMAIL : p2kawaykanan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dapat tersusun. LKjIP ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2026.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan periode RPJMD 2021 – 2026 yaitu “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan satu misi yang menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**”. selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2026 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023. Semoga (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Ringkasan Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	4
Bab II Perencanaan Kinerja	10
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	16
Bab IV Penutup.....	26

IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dapat disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan merupakan uraian tentang pelaksanaan kinerja instansi pemerintah dan berisi tentang informasi mengenai keberhasilan, kendala dan hambatan dalam proses pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah serta berisi informasi mengenai aspek keuangan berupa hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Tujuan penyusunan laporan ini untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas dan hasil-hasil yang telah dicapai sehingga dapat dijadikan landasan dan acuan untuk menetapkan rencana-rencana strategik pembangunan ke depan khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan.

Tentu kami berharap dimasa mendatang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan akan terus melakukan berbagai upaya dan langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi serta memperbaiki kinerjanya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa mendatang dalam membangun Way Kanan lebih baik lagi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka mewujudkan *Good Government*, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026.

Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan, didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk

Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Way Kanan No. 66 Tahun 2016 tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan fungsi yang diemban, BPKAD sebagai organisasi perangkat daerah yang memperoleh kewenangan dari Bupati Way Kanan sebagai kepala Pemerintahan Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan sebagai yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani. Dalam pengelolaan keuangan daerah Bupati Way Kanan melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada yaitu sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

2. Kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah); dan
3. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Sedang Bupati Way Kanan sebagai yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah telah melimpahkan ketugasan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah yang dibantu oleh BPKAD sebagai pembantu pengelola barang daerah. Dengan demikian BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki tiga fungsi yang melekat yaitu sebagai:

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah); dan
3. Pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Way Kanan berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. BPKAD memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki tekad untuk menciptakan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai upaya memperkuat otonomi daerah. Selain itu BPKAD juga sebagai penentu dalam memberi gambaran untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan koordinator pada pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan terdapat susunan organisasi yang terdiri dari : Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

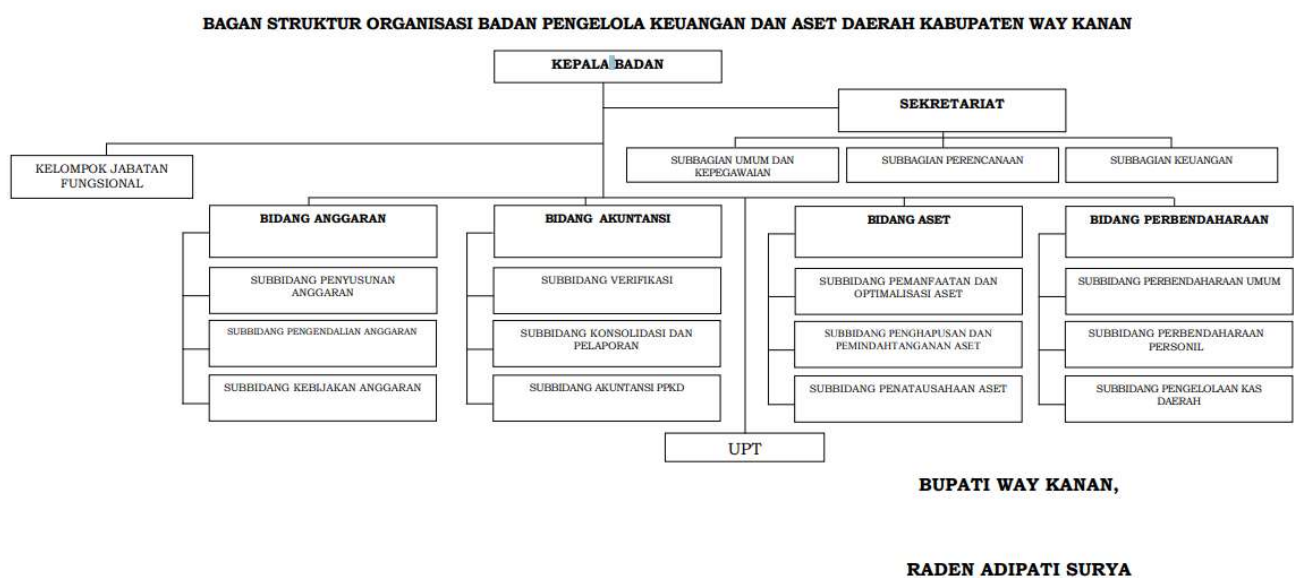
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
 2. Subbidang Kebijakan Anggaran.
- d. Bidang Akuntansi, membawahi :
 1. Subbidang Verifikasi;
 2. Subbidang Konsolidasi dan Pelaporan

- e. Bidang Aset, membawahi :
 1. Subbidang Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset;
 2. Subbidang Penatausahaan Aset.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Subbidang Perbendaharaan Umum;
 2. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis;

Bagan struktur Organisasi badan pengelolaan keuangan dan aset sebagai berikut :

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN



1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan selama tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini

akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan diperlukan suatu penyajian yang berurutan dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut :

1. Bab I : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latarbelakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi aspek strategis serta struktur organisasi
2. Bab II : PERENCANAAN KINERJA
berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2021
3. Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA
berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2022 dengan Pencapaian kinerja Tahun 2021 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan kinerja selama tahun 2023
4. Bab IV : PENUTUP
berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Visi “**Mewujudkan Way Kanan unggul dan Sejahtera**” melalui misi 1 yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang baik maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Way Kanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan 2026.

2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Way Kanan

Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan BPKAD Kabupaten Way Kanan tentunya mengacu pada Visi dan Misi Bupati Way Kanan yang diturunkan menjadi Sasaran Strategis RPJMD untuk dicapai. Hasil Sasaran Strategis itulah yang kemudian menjadi tujuan BPKAD Kabupaten Way Kanan. Pada dasarnya tujuan adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka BPKAD Kabupaten Way Kanan merumuskan tujuan yang terkait dengan misi. Adapun tujuan BPKAD Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran

Sasaran strategis Perangkat Daerah adalah hasil yang diharapkan dari tujuan selama periode renstra yang dapat diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dikatakan tercapai apabila pengukur dari sasaran berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan. Munculnya sasaran strategis BPKAD Kabupaten Way Kanan adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.1
Indikator Kinerja BPKAD yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Penjelasan / Formulasi	Satuan	Taregt Kinerja Tujuan / Sasaran						Sumber Data
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Meningkatn ya Akuntabilit as Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten (Point)		Point	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	62,64	Hasil Penilaian Menpan RB
		Meningkatkan Kualitas SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (point)	Nilai yang diberikan Inspektorat Kabupaten	Point	60,63	60,64	61,67	62,61	63,12	65,62	Hasil Penilaian Inspekto rat Kabupat en
2	Meningkatn ya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Indeks Pengelolaan KeuanganDa erah	Point	60.2	60.28	60.36	60.44	60.52	60.6	Dokume n Kua PPAS dan APBD Tahunan Kabupat en

		Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	8	8.04	8.08	8.12	8.16	8.2	Dokumen KUA PPAS
		Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	15	15	15	15	15	15	Dokumen APBD Tahunan

		Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendgri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	8	8.04	8.08	8.12	8.16	8.2	Dokume n APBD Tahunan dan LKPD Tahunan
		Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Skor Penyerapan Anggaran (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendgri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	14	14	14	14	14	14	LKPD Tahunan

		Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik	Skor Kondisi Keuangan Daerah (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	LKPD Tahunan
		Meningkatkn kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	15	15	15	15	15	15	LKPD Tahunan

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Penentuan strategi untuk pencapaian tujuan melalui pencapaian setiap indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-

faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai didalam BPKAD dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor diluar BPKAD yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT telah menghasilkan arahan atau rekomendasi berupa strategi untuk mencapai tujuan akhir dari misi dan visi BPKAD. Adapun analisa SWOT disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Matrik SWOT Dalam Rangka Penentuan Strategi

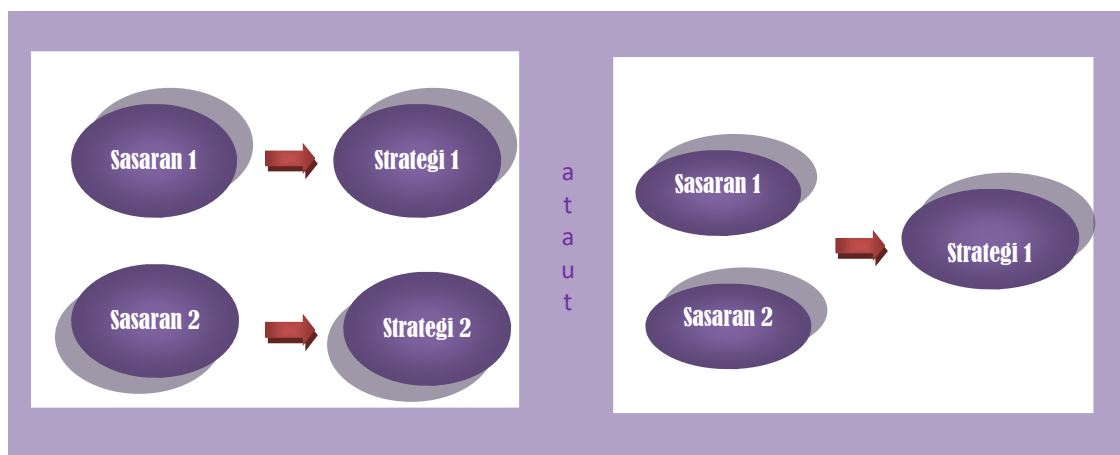
Faktor	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Keberhasilan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Tersedianya media informasi dan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan Jumlah SDM dan sarana prasarana tidak memadai
Faktor Kunci Keberhasilan Eksternal		
Opportunity (Peluang)	S-O	W-O
<ol style="list-style-type: none"> Komitmen Pemerintah Kabupaten Way Kanan mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Way Kanan melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrua 	<ol style="list-style-type: none"> Terapkan SAP berbasis akrua dalam pengelolaan keuangan daerah untuk tetap mempertahankan opini WTP Manfaatkan teknologi informasi dan aplikasi sistem dalam pengelolaan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> Integrasikan sistem pengelolaan keuangan dengan sistem perencanaan Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset.

daerah
berbasis akrual

Threat (Ancaman)	S-T	W-T
1. Kurang komitmen kepala PD/Unit Kerja selaku pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan barang milik daerah secara tertib	1. Tingkatkan komitmen dan konsistensi semua pihak terkait proses pengelolaan anggaran belanja daerah dan pengelolaan barang milik daerah 2. Sosialisasi dan publikasi pengelolaan keuangan berbasis akrual dengan memanfaatkan teknologi informasi	1. Integrasikan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 2. Diklat/bimtek pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah

Dari analisa SWOT tersebut diatas selanjutnya ditetapkan suatu strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Oleh karena itu Perangkat Daerah harus dengan tepat dalam memilih strategi sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara OPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif dan efisien. Selain itu strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

Gambar 5.2 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi



Berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD telah menetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”				
MISI 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1.6 Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1.1.6 Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	1.1.6.27 Meningkatkan kualitas SAKIP BPKAD	Merumuskan perencanaan kinerja BPKAD dengan efektif dan terukur	
1.2 Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.2.1 Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1.2.1.2 Meningkatkan kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS	Konsistensi nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS	
		1.2.1.3 Meningkatkan kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD	Konsistensi nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD	

		1.2.1.4	Meningkatkan kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS	Konsistensi pagu program RKPD dan KUA PPAS
		1.2.1.5	Meningkatkan kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD	Konsistensi pagu program KUA PPAS dan APBD
		1.2.1.6	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Merumuskan kebijakan dalam penyusunan anggaran APBD
1.2.2	Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	1.2.2.1	Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%	Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 %
		1.2.2.2	Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji	Mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan sebesar 10 %
		1.2.2.3	Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer	Mengalokasikan anggaran fungsi infrastruktur sebesar 25 %

		1.2.2.4	Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Mengalokasikan anggaran fungsi standar pelayanan minimal sesuai perundang undangan
	1.2.3 Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	1.2.3.1	Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah	Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
	1.2.4 Meningkatkan Penyerapan Anggaran	1.2.4.1	Optimalisasi Penyerapan Anggaran	Menciptakan serapan anggaran SKPD
	1.2.5 Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik	1.2.5.1	Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah	Meningkatkan kondisi keuangan yang stabil
	1.2.6 Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	1.2.6.1	Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual
		1.2.6.2	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan pada Tahun Anggaran 2023, melaksanakan 3 (Tiga) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Tahun 2023

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan melaksanakan 13 (Tiga Belas) kegiatan, dan 62 Sub Kegiatan yaitu:

No	Uraian Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
7		
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
15		
16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
18		
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
26		
27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
29		
30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
33		
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
39		
40	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
41	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
42	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
43	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
44	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
45	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
46	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
47	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
48	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
49	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
50	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
51	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
52		
53	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
54	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
55	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
56	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
57	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
58	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
59	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
60		
61	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
62	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
63	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
64	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
65	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	

66	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
67	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
68	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
69	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
70	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
71		
72	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
73	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
74	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
75	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
76		
77	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
78	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	
79	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
80	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
81		
82	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
83	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
84	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
85	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
86	Inventarisasi Barang Milik Daerah	
87	Pengamanan Barang Milik Daerah	
88	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
89	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
90	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

2.2. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Penetapan Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun Ketiga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan, sehingga capaian kinerja tahun 2023 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2021-2026. Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Penjelasan / Formulasi	Satuan	Target Kinerja 2023	Sumber Data
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten (Point)		Point	60,64	Hasil Penilaian Menpan RB
		Meningkatkan Kualitas SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (point)	Nilai yang diberikan Inspektorat Kabupaten	Point	61,67	Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Point	60,36	Dokumen Kua PPAS dan APBD Tahunan Kabupaten
		Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah)	Point	8,08	Dokumen KUA PPAS

		Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	15	Dokumen APBD Tahunan
		Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	8,08	Dokumen APBD Tahunan dan LKPD Tahunan
		Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Skor Penyerapan Anggaran (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	14	LKPD Tahunan

		Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik	Skor Kondisi Keuangan Daerah (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	0,2	LKPD Tahunan
		Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	15	LKPD Tahunan

Untuk mengukur indek pengelolaan keuangan daerah semua indicator badan pengelolaan keuangan dan asset daerah melalui beberapa dimensi antara lain :

1. Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Untuk mengukur Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan formulasinya adalah rata rata dari seluruh dimensi di kali dengan bobotnya, adapun bobotnya untuk dimensi ini adalah 15. Adapun tahapan untuk mengukur skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran antara lain :

- a. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS
- b. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD
- c. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA PPAS
- d. Kesesuaian pagu program KUA PPAS dan APBD

2. Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam IPKD, Indikator-indikator yang terdapat dalam dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan beberapa amanat

peraturan perundang-undangan (mandatory spending). Indikator-indikator yang digunakan antara lain :

- a. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD.
- b. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji.
- c. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum.
- d. Alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Penentuan Skor untuk masing-masing indikator pada dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dilakukan dengan cara:

1. Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1.
 2. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan diberikan skor 0.
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (D.3)

Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator:

- 1) ketepatan waktu; dan
- 2) keteraksesan.

Pengukuran atas ketepatan waktu dan keteraksesan tersebut dilakukan terhadap beberapa dokumen yaitu:

1. Informasi Ringkasan Dokumen RKPd.
2. Informasi Kebijakan Umum Anggaran.
3. Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran.
4. Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD
5. Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD.
6. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Informasi Peraturan Daerah tentang APBD.
8. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
9. Informasi Ringkasan DPA SKPD.
10. Informasi DPA PPKD.
11. Informasi Realisasi Pendapatan Daerah.
12. Informasi Realisasi Belanja Daerah.
13. Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah.
14. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD.

15. Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
16. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
17. Informasi Ringkasan RKA Perubahan.
18. Informasi Rencana Umum Pengadaan.
19. Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
20. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi.
21. Informasi Laporan Arus Kas.
22. Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD.
23. Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD.
24. Informasi Neraca.
25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah.
26. Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.
27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.
28. Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
29. Informasi Opini BPK.

4. Penyerapan Anggaran

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.

Penentuan skor masing-masing indikator untuk dimensi penyerapan anggaran adalah persentase antara anggaran belanja dengan realisasinya. Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau diatas 80% (2 80%) maka skor diberi angka I. Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% (< 80%), maka skor diberikan angka 0.

5. Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya (Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas jangka pendek, Solvabilitas jangka panjang, dan Solvabilitas Layanan), mengantisipasi kejadian tak terduga; dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif.

Indeks dimensi kondisi keuangan daerah dilihat dari 6 (enam) indikator pembentuk kondisi keuangan pemerintah daerah, dengan formulasi sebagaimana dijlaskan dalam tabel berikut ini:

No	Indikator	Definisi	Formula
1	Kemandirian keuangan	kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendali atau pengaruhnya, baik dari sumber sumber dalam negeri maupun luar negeri	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$
2	fleksibilitas keuangan	fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi komitmen, baik melalui penigkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (dep capacity)	$\frac{(\text{total pendapatan} - \text{DAK})}{(\text{total kewajiban} + \text{Belanja pegawai})}$
3	Solvabilitas operasional	Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapat untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran	$\frac{\text{total pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO}}{\text{total beban LO}}$
4	Solvabilitas jangka pendek	Solvabilitas jangka pendek menunjukan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan	$\frac{(\text{Kas dan setara Kas} + \text{Investasi Jk Pendek})}{\text{kewajiban lancar}}$
5	Solvabilitas jangka panjang	Solvabilitas jangka panjang merupakan kemapuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang	$\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{kewajiban jangka panjang}}$
6	Solvabilitas layanan	Solvabilitas layanan menunjukan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan di inginkan oleh masyarakat	$\frac{\text{total aset tetap}}{\text{jumlah penduduk}}$

6. Opini BPK

Pemberian opini atas LKPD dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan opini atas LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil opini BPK atas LKPD, maka dalam pengukuran skor dimensi opini BPK diperoleh dengan cara:

- I. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor I.
2. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 2 tahun (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor $\frac{2}{3}$ (0,667).
3. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 1 tahun (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor $\frac{1}{3}$ (0,334).
4. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini disclaimer diberikan skor 0.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka semua instansi pemerintah, badan, dan lembaga negara, di pusat dan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya, karena pertanggungjawaban yang diberikan harus meliputi baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategik instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Indikator Kinerja

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Program Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan dalam tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan pengukuran kinerja yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) tahun 2023. Pengukuran kinerja dengan melihat capaian kinerja merupakan bentuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan unit kerja terkait.

Kelompok indikator kinerja yang akan dilakukan pengukuran adalah:

1. Indikator Kinerja Masukan (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator Kinerja Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun non fisik.
3. Indikator kinerja Hasil (*outcome*) merupakan indikator kinerja yang menunjukkan berfungsinya keluaran (*output*).

Tabel 3.1 Rincian Penilaian Rentang Capaian Kategori Capaian Indikator Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih besar dari 100 %	Sangat baik
II	> 90 % sampai dengan 100 %	Baik

III	>70 % sampai dengan 90 %	Cukup
IV	> 55 % sampai dengan 70 %	Kurang
V	> 0 % sampai dengan 55 %	Sangat kurang
VI	Sama dengan 0	Belum terukur

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (*key performance indicators*) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (*input*) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (*output, outcomes dan benefit*).

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk; 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.3 Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Way Kanan

Dalam menyusun IKU BPKAD Kabupaten Way Kanan melalui tahap pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun di daerah, yaitu;

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
3. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
4. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
5. Kebutuhan data statistik pemerintah;
6. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Tabel 3.2 Pencapaian IKU BPKAD

Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Penjelasan / Formulasi	Satuan	Target Kinerja 2023	Sumber Data
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten (Point)		Point	60,64	Hasil Penilaian Menpan RB
		Meningkatkan Kualitas SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (point)	Nilai yang diberikan Inspektorat Kabupaten	Point	61,67	Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Point	60,36	Dokumen Kua PPAS dan APBD Tahunan Kabupaten
		Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	8,08	Dokumen KUA PPAS

		Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	15	Dokumen APBD Tahunan
		Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	8,08	Dokumen APBD Tahunan dan LKPD Tahunan
		Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Skor Penyerapan Anggaran (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	14	LKPD Tahunan

		Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik	Skor Kondisi Keuangan Daerah (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	0,2	LKPD Tahunan
		Meningkatkn kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah)	Point	15	LKPD Tahunan

Dari dua (2) Tujuan dan Tujuh (7) Sasaran tersebut BPKAD memiliki program - program untuk mencapai Tujuan tersebut antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Program	Sasaran	Indikator	Target	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (point)	61.67	

Sebagai sasaran pendukung dalam rangka “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah”, maka dalam bab ini dirasa perlu sedikit menjelaskan bahwa BPKAD Kabupaten way Kanan berupaya mengatur upaya strategis untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan

kinerja aparaturnya agar bisa mencapai nilai Sakip A di tahun 2023. Peningkatan nilai dari tahun ke tahun terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari nilai C pada tahun 2017 menjadi CC untuk tahun 2018, sedangkan ditahun 2022 nilai SAKIP BPKAD B dengan skor 66.66 ini membuktikan bahwa kinerja instansi pemerintahan OPD termasuk BPKAD sebagai badan yang mengelola keuangan dan aset daerah dalam menuangkan program dan arah keuangannya sudah akurat dan juga perlu adanya evaluasi terhadap program-program yang tidak menukik pada indikator kerjanya saja tetapi juga harus tepat sasaran, sedangkan untuk nilai SAKIP tahun 2023 skornya di nilai ditahun 2024.

2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

A. Bidang Anggaran

Program	Sasaran	Indikator	Target	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (point)	8.08	
	Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (point)	15	

1. Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Dalam mengukur skor kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan melalui beberapa tahapan antara lain :

a. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS

Penentuan skor kesesuaian antara program RKPD dan KUA – PPAS adalah dengan menjumlahkan skor masing masing program yang sesuai dan yang tidak

sesuai, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program. Formulasi untuk penentuan skor adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor} = \frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$

b. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD

Penentuan skor kesesuaian antara KUA PPAS dan APBD adalah dengan menjumlahkan skor masing masing program yang sesuai dan yang tidak sesuai dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program formulasi untuk penentuan skor adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor} = \frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$

c. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA PPAS

Penentuan skor kesesuaian antara kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA PPAS adalah dengan menjumlahkan skor masing masing pagu per program yang sesuai dan yang tidak sesuai selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program formulasi untuk penentuan skor adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor} = \frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

d. Kesesuaian pagu program KUA PPAS dan APBD

Penentuan skor kesesuaian antara kesesuaian jumlah pagu per program KUA PPAS dan APBD adalah dengan menjumlahkan skor masing masing pagu per program yang sesuai dan yang tidak sesuai selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program formulasi untuk penentuan skor adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor} = \frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

Selanjutnya berdasarkan skor masing masing diatas, maka hasil pengukuran indek dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran diperoleh dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Indek} = \text{skor rata rata} \times \text{bobot}$$

Catatan : Bobot yang diberikan untuk kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah 15

2. Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam IPKD. Indikatornya antara lain :

- a. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD
- b. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% dari APBD di luar gaji
- c. Alokasi jumlah belanja infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar 25 % dari dana transfer umum
- d. Alokasi belanja untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

Formulasinya sebagai berikut :

$$\text{Indek} = \text{skor rata rata} \times \text{bobot}$$

B. Bidang Akuntansi dan Bidang Aset

1. Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan

Program	Sasaran	Indikator	Target	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)	15	

Pemberian opini atas LKPD dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan. Untuk memberikan opini atas LKPD antaran lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, system pengendalian internal dan ketaatan perundang undangan. Untuk mengukur skor LKPD antara lain :

- a. Apabila pemerintah daerah memperoleh WTP 3 tahun secara berturut turut akan diberikan skor 1
- b. Apabila pemerintah daerah memperoleh WTP 2 tahun secara berturut turut akan diberikan skor $\frac{2}{3}$ (0.667) (dalam 3 tahun terakhir)
- c. Apabila pemerintah daerah memperoleh WTP 1 tahun secara berturut turut akan diberikan skor $\frac{1}{3}$ (0.334) (dalam 3 tahun terakhir)
- d. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini disclaimer diberikan skor 0

Formulasinya

$$\text{Opini} = \text{skor} \times \text{bobot}$$

Catatan : bobot opini adalah 15

2. Tertib Administrasi Barang Milik Daerah

Program	Sasaran	Indikator	Targe t	
Program Pengelo laan Aset Daerah	Meningkatkn kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100	

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan dukungan teknis penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan tujuan dari program pengelolaan barang milik daerah adalah menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terwujudnya akuntabilitas, ketertiban, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah. Selain itu pengelolaan barang milik daerah mempunyai peran yang penting sebagai salah satu unsur penilaian opini pemeriksaan BPK bidang Aset melaksanakan 1

program yang memiliki satu indikator kinerja sebagai hasil/*outcome* dari program tersebut.

C. Bidang perbendaharaan

Program	Sasaran	Indikator	Target	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Skor Penyerapan Anggaran (point)	14	
	Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik	Skor Kondisi Keuangan Daerah (point)	0.2	

1. Skor Penyerapan Anggaran

Dalam penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan bersama evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasaan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.

Formulasi indeks penyerapan anggaran sebagai berikut :

$$\text{Indek} = \text{skor rata rata} \times \text{bobot}$$

Catatan :

- Bobot dalam menghitung penyerapan anggaran adalah 20
- Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai di atas 80% maka skornya adalah 1 dan sebaliknya apabila dibawah 80 % skornya adalah 0.

2. Skor Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan sesuatu pemerintahan daerah untuk memenuhi kewajibannya. Indeks kondisi keuangan daerah dilihat

dari 6 indikator pembentuk kondisi keuangan pemerintah daerah, dengan formulasi sebagai berikut :

- a. Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintahan daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan diluar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber sumber dalam negeri maupun luar negeri

$$\text{Formula} = \frac{\text{total PAD}}{\text{total pendapatan}}$$

- b. Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas uang.

$$\text{Formula} = \frac{\text{Total pendapatan} - \text{DAK}}{\text{Total kewajiban} + \text{belanja pegawai}}$$

- c. Solvabilitas Operasional adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.

$$\text{Formula} = \frac{\text{Total pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO}}{\text{Total Beban LO}}$$

- d. Solvabilitas jangka pendek adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo selama dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan.

$$\text{Formula} = \frac{\text{Kas dan setara kas} + \text{Investasi jk Pendek}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

- e. Solvabilitas Jangka Panjang adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

$$\text{Formula} = \frac{\text{Total asset tetap}}{\text{Kewajiban jangka panjang}}$$

- f. Solvabilitas layanan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

$$\text{Formula} = \frac{\text{total asset tetap}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Dari hasil perhitungan indicator diatas dapat disimpulkan untuk mencari indek kondisi keuangan daerah dengan rumus :

$$\text{Indek indicator} = \frac{\text{nilai actual} - \text{nilai minimum}}{\text{Nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}$$

D. UPT IT

Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indicator ketepatan waktu dan keteraksesan data adapun dokumen yang dibutuhkan untuk menghitung skor dari dokumen perencanaan, penganggaran sampai pelaporan realisasi pertanggungjawaban APBD. dalam menentukan nilai ketepatan waktu dan keteraksesan data diberikan nilai 1 jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia dan telah dipublikasikan paling lambat 30 hari setelah dokumen tersebut ditetapkan dan jika kondisi sebaliknya diberikan nilai 0. Rumus untuk menghitung skor tersebut adalah

$$\text{Indek} = \text{skor rata rata} \times \text{bobot} (15)$$

3.4 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	
			2021	2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah			
		Meningkatkan Kualitas SAKIP OPD	61.02	61.02

2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah			
		Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	14.51	13.08
		Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	20	20
		Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	13.71	13.71
		Meningkatkan Penyerapan Anggaran	17.77	14.28
		Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik	0.03	0.2
		Meningkatkn kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	15	15

Analisis terhadap pencapaian sasaran Tahun 2023 diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

3.4.1 Sasaran 1. Nilai SAKIP BPKAD

Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Sakip SKPD (Bidang Sekretariat)

Bidang sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis dalam penyusunan SAKIP SKPD. Terselenggaranya ketugasan tersebut, bidang sekretariat telah melaksanakan 3 Sub kegiatan dari 1 program yang memiliki 1 indikator kinerja sebagai hasil/*outcome* dari program tersebut. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu

Indikator	Formula	TARGET 2023
Nilai SAKIP BPKAD	Nilai yang diberikan Inspektorat Kabupaten	61.67

Penerapan SAKIP harus menetapkan outcome apa yang akan dicapai dengan target yang terukur dan sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Kuncinya terletak pada pengukuran kinerja yang jelas. Namun tentunya di dalam penerapan / mengimplementasikan SAKIP di Kab. Way Kanan , begitu pula pada BPKAD Kab. Way Kanan tidak terlepas dari permasalahan / tantangan terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Dokumen perencanaan/penganggaran belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penetapan kinerja dalam SAKIP;
2. Perlu mengintegrasikan penerapan manajemen kinerja dengan dokumen perencanaan / dokumen anggaran.

Adapun strategi yang digunakan dalam peningkatan SAKIP BPKAD Kab. Way Kanan, yaitu:

1. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja, yang pelaksanaannya ditunjang dengan e-Government yang memanfaatkan perkembangan IT, seperti e-planning dan e-budgeting dengan pendekatan sistem AKIP;
2. Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan;
3. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dengan cara :
 - a. Monitoring pencapaian kinerja secara berkala;
 - b. Penggunaan kontrak kinerja individu untuk mengukur capaian kinerja masing-masing pegawai;
 - c. Optimalisasi peran stakeholder dalam mengevaluasi capaian IKU dalam Perjanjian Kinerja.
4. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.

Untuk mencapai target dari Indikator tersebut , maka dilaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	5		6	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPAKD	Nilai SAKIP BPAKD	61,67	Proses
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Nilai SAKIP BPAKD	Nilai SAKIP BPAKD	61,67	Proses

3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan
7					
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terlaksanannya Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah	100	100
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 ASN gaji dan 42 asn tamsil	42 ASN gaji dan 42 asn tamsil

10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen
15					

16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan kepegawaian perangkat daerah	Persentase Kegiatan kepegawaian perangkat daerah	100	100
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Pegawai	54 Pegawai
18					
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Adm Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Adm Umum Perangkat Daerah	100	100
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan

25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan
26					
27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit
29					
30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya kegiatan Jasa urusan Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan Jasa urusan Pemerintahan	100	100
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lapiroan	1 Lapiroan
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
33					
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Jasa urusan Pemerintahan	100	100

35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	3 unit
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit Gedung	2 Unit Gedung
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 unit AC dan 30 Unit Meja	27 unit AC dan 30 Unit Meja

3.4.2 Sasaran 2 : Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Perencanaan dan Penganggaran APBD (Bidang Anggaran)

Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis bidang anggaran. Terselenggaranya ketugasan tersebut, bidang Anggaran telah melaksanakan 11 Sub kegiatan dari 1 program yang memiliki 2 indikator kinerja sebagai hasil/*outcome* dari program tersebut. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu

Indikator	Formula	Target 2023
Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (point)	Point = skor rata rata x bobot	8.08
Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (point)	Point = skor rata rata x bobot	15

A. Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Dalam mengukur skor kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan melalui beberapa tahapan antara lain :

1. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS

Penentuan skor kesesuaian antara program RKPD dan KUA – PPAS adalah dengan menjumlahkan skor masing masing program yang sesuai dan yang tidak sesuai, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program. Formulasi untuk penentuan skor adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor} = \frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$

Pada tahun 2023 jumlah program RKPD dan KUA PPAS berjumlah 131 program dimana keseluruhan program nomenklturnya sama jadi perhitungan skornya dapat dilihat ditabel sebagai berikut :

No	PROGRAM RKPD	PROGRAM KUA PPAS	Penilaian		Penentuan Skor
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Sesuai	1	Jumlah yang sesuai = 131 Jumlah Program = 131 Skor : 131/131 = 1
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sesuai	1	
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Sesuai	1	
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Sesuai	1	
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Sesuai	1	
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sesuai	1	

7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sesuai	1
8	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sesuai	1
9	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Sesuai	1
10	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Sesuai	1
11	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Sesuai	1
12	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Sesuai	1
13	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sesuai	1
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Sesuai	1
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Sesuai	1
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Sesuai	1
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Sesuai	1
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sesuai	1
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sesuai	1
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Sesuai	1
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Sesuai	1
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Sesuai	1
23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Sesuai	1

24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Sesuai	1
25	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Sesuai	1
26	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Sesuai	1
27	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Sesuai	1
28	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Sesuai	1
29	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sesuai	1
30	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sesuai	1
31	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Sesuai	1
32	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Sesuai	1
33	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Sesuai	1
34	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Sesuai	1
35	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Sesuai	1
36	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Sesuai	1
37	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Sesuai	1
38	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Sesuai	1
39	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Sesuai	1
40	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Sesuai	1
41	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Sesuai	1
42	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Sesuai	1
43	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Sesuai	1
44	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Sesuai	1

45	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Sesuai	1
46	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sesuai	1
47	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Sesuai	1
48	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Sesuai	1
49	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Sesuai	1
50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Sesuai	1
51	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Sesuai	1
52	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Sesuai	1
53	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Sesuai	1
54	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Sesuai	1
55	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Sesuai	1
56	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Sesuai	1
57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sesuai	1
58	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Sesuai	1
59	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Sesuai	1
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Sesuai	1
61	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Sesuai	1
62	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Sesuai	1
63	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Sesuai	1
64	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Sesuai	1
65	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Sesuai	1

66	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Sesuai	1
67	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Sesuai	1
68	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Sesuai	1
69	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Sesuai	1
70	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Sesuai	1
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Sesuai	1
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Sesuai	1
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sesuai	1
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Sesuai	1
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Sesuai	1
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Sesuai	1
77	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sesuai	1
78	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sesuai	1
79	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Sesuai	1
80	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Sesuai	1
81	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Sesuai	1
82	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Sesuai	1
83	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Sesuai	1
84	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Sesuai	1
85	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Sesuai	1
86	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Sesuai	1

87	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Sesuai	1
88	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Sesuai	1
89	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Sesuai	1
90	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Sesuai	1
91	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Sesuai	1
92	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Sesuai	1
93	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Sesuai	1
94	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Sesuai	1
95	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Sesuai	1
96	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Sesuai	1
97	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Sesuai	1
98	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Sesuai	1
99	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sesuai	1
100	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Sesuai	1
101	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Sesuai	1

102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sesuai	1
103	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Sesuai	1
104	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Sesuai	1
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Sesuai	1
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Sesuai	1
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Sesuai	1
108	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Sesuai	1
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Sesuai	1
110	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sesuai	1
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Sesuai	1
112	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sesuai	1
113	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Sesuai	1
114	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Sesuai	1
115	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Sesuai	1
116	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sesuai	1
117	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Sesuai	1
118	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Sesuai	1
119	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Sesuai	1

120	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sesuai	1
121	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sesuai	1
122	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Sesuai	1
123	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Sesuai	1
124	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Sesuai	1
125	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Sesuai	1
126	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Sesuai	1
127	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Sesuai	1
128	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sesuai	1
129	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Sesuai	1
130	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Sesuai	1
131	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Sesuai	1

2. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD

Penentuan skor kesesuaian antara KUA PPAS dan APBD adalah dengan menjumlahkan skor masing masing program yang sesuai dan yang tidak sesuai dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program formulasi untuk penentuan skor adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor} = \frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$

Pada tahun 2023 jumlah program KUA PPAS dan APBD berjumlah 131 program dimana keseluruhan program nomenklaturnya sama jadi perhitungan skornya dapat dilihat ditabel sebagai berikut :

No	PROGRAM KUA PPAS	PROGRAM APBD	Penilaian		Penentuan Skor
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Sesuai	1	Jumlah yang sesuai = 131 Jumlah Program = 131 Skor : 131/131 = 1
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sesuai	1	
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Sesuai	1	
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Sesuai	1	
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Sesuai	1	
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sesuai	1	
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sesuai	1	
8	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sesuai	1	
9	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Sesuai	1	
10	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Sesuai	1	
11	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Sesuai	1	
12	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Sesuai	1	
13	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sesuai	1	
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Sesuai	1	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Sesuai	1	
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Sesuai	1	

17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Sesuai	1
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sesuai	1
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sesuai	1
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Sesuai	1
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Sesuai	1
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Sesuai	1
23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Sesuai	1
24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Sesuai	1
25	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Sesuai	1
26	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Sesuai	1
27	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Sesuai	1
28	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Sesuai	1
29	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sesuai	1
30	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sesuai	1
31	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Sesuai	1
32	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Sesuai	1
33	PROGRAM PENANGANAN	PROGRAM PENANGANAN	Sesuai	1

	PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
34	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Sesuai	1
35	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Sesuai	1
36	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Sesuai	1
37	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Sesuai	1
38	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Sesuai	1
39	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Sesuai	1
40	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Sesuai	1
41	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Sesuai	1
42	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Sesuai	1
43	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Sesuai	1
44	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Sesuai	1
45	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Sesuai	1
46	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sesuai	1
47	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Sesuai	1
48	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Sesuai	1
49	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Sesuai	1
50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Sesuai	1

51	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Sesuai	1
52	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Sesuai	1
53	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Sesuai	1
54	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Sesuai	1
55	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Sesuai	1
56	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Sesuai	1
57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sesuai	1
58	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Sesuai	1
59	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Sesuai	1
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Sesuai	1
61	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Sesuai	1
62	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Sesuai	1
63	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Sesuai	1
64	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Sesuai	1
65	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Sesuai	1
66	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Sesuai	1

67	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Sesuai	1
68	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Sesuai	1
69	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Sesuai	1
70	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Sesuai	1
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Sesuai	1
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Sesuai	1
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sesuai	1
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Sesuai	1
75	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Sesuai	1
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Sesuai	1
77	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sesuai	1
78	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sesuai	1
79	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Sesuai	1
80	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Sesuai	1
81	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Sesuai	1
82	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Sesuai	1

83	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Sesuai	1
84	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Sesuai	1
85	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Sesuai	1
86	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Sesuai	1
87	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Sesuai	1
88	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Sesuai	1
89	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Sesuai	1
90	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Sesuai	1
91	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Sesuai	1
92	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Sesuai	1
93	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Sesuai	1
94	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Sesuai	1
95	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Sesuai	1

96	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Sesuai	1
97	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Sesuai	1
98	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Sesuai	1
99	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sesuai	1
100	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Sesuai	1
101	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Sesuai	1
102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sesuai	1
103	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Sesuai	1
104	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Sesuai	1
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Sesuai	1
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Sesuai	1
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Sesuai	1
108	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Sesuai	1
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Sesuai	1

110	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sesuai	1
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Sesuai	1
112	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sesuai	1
113	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Sesuai	1
114	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Sesuai	1
115	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Sesuai	1
116	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sesuai	1
117	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Sesuai	1
118	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Sesuai	1
119	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Sesuai	1
120	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sesuai	1
121	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sesuai	1
122	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Sesuai	1
123	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Sesuai	1
124	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Sesuai	1
125	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Sesuai	1
126	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Sesuai	1

127	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Sesuai	1
128	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sesuai	1
129	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Sesuai	1
130	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Sesuai	1
131	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Sesuai	1

3. Kesesuaian pagu RKPD dan KUA PPAS

Penentuan skor kesesuaian antara kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA PPAS adalah dengan menjumlahkan skor masing masing pagu per program yang sesuai dan yang tidak sesuai selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program formulasi untuk penentuan skor adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor} = \frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

Kesesuaian pagu pada RKPD dan KUA PPAS dengan jumlah pagu program 131 dimana terdapat pagu yang tidak sesuai berjumlah 51 dan pagu program yang sesuai berjumlah 80 pagu program jadi perhitungan skornya dapat dilihat pada table berikut :

No	Program	Pagu RKPD (Rp)	Pagu KUA PPAS (Rp)	Selisih	Penentuan Skor		
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.714.857.800,00	1.978.457.800,00	(263.600.000,00)	Tidak Sesuai	0	Jumlah yang sesuai = 80
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.656.208.800,00	19.656.208.800,00	0,00	Sesuai	1	Jumlah yang tidak sesuai = 51
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	90.903.000,00	168.376.000,00	(77.473.000,00)	Tidak Sesuai	0	Jumlah Program = 131
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.686.744.100,00	1.834.052.100,00	(147.308.000,00)	Tidak Sesuai	0	Skor : 80/131

5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.849.852.000,00	2.212.352.000,00	(362.500.000,00)	Tidak Sesuai	0	=0,610
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.284.015.900,00	1.334.015.900,00	(50.000.000,00)	Tidak Sesuai	0	
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	666.241.088,00	666.241.088,00	0,00	Sesuai	1	
8	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47.688.000,00	47.688.000,00	0,00	Sesuai	1	
9	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	143.080.000,00	273.709.000,00	(130.629.000,00)	Tidak Sesuai	0	
10	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	278.764.000,00	278.764.000,00	0,00	Sesuai	1	
11	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	189.199.000,00	189.199.000,00	0,00	Sesuai	1	
12	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	153.270.000,00	104.270.000,00	49.000.000,00	Tidak Sesuai	0	
13	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	104.850.100,00	104.850.100,00	0,00	Sesuai	1	
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	98.725.000,00	98.725.000,00	0,00	Sesuai	1	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.760.520.000,00	2.360.714.750,00	399.805.250,00	Tidak Sesuai	0	
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	82.987.800,00	82.987.800,00	0,00	Sesuai	1	
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	458.353.886,00	596.093.886,00	(137.740.000,00)	Tidak Sesuai	0	
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.404.362.855,00	2.404.362.855,00	0,00	Sesuai	1	
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	203.500.000,00	270.300.000,00	(66.800.000,00)	Tidak Sesuai	0	

20	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	99.827.400,00	99.827.400,00	0,00	Sesuai	1
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.770.629.500,00	2.091.470.000,00	(320.840.500,00)	Tidak Sesuai	0
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	864.290.000,00	902.290.000,00	(38.000.000,00)	Tidak Sesuai	0
23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	758.583.241,00	758.583.241,00	0,00	Sesuai	1
24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	Sesuai	1
25	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.566.483.150,00	3.966.288.400,00	(399.805.250,00)	Tidak Sesuai	0
26	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	679.701.500,00	679.701.500,00	0,00	Sesuai	1
27	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	48.806.000,00	48.806.000,00	0,00	Sesuai	1
28	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	61.531.000,00	61.531.000,00	0,00	Sesuai	1
29	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	62.096.191.306,00	65.833.670.136,00	(3.737.478.830,00)	Tidak Sesuai	0
30	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.899.576.880,00	6.594.127.830,00	305.449.050,00	Tidak Sesuai	0
31	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	279.100.000,00	279.100.000,00	0,00	Sesuai	1
32	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	109.324.600,00	109.324.600,00	0,00	Sesuai	1
33	PROGRAM PENANGANAN	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Sesuai	1

	PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
34	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.294.400.600,00	1.839.400.600,00	(545.000.000,00)	Tidak Sesuai	0
35	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.339.590.886,00	3.537.112.283,00	(197.521.397,00)	Tidak Sesuai	0
36	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	412.485.000,00	412.485.000,00	0,00	Sesuai	1
37	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	50.184.000,00	50.184.000,00	0,00	Sesuai	1
38	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	126.500.100,00	126.500.100,00	0,00	Sesuai	1
39	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	790.914.200,00	785.914.200,00	5.000.000,00	Tidak Sesuai	0
40	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	564.875.100,00	564.875.100,00	0,00	Sesuai	1
41	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	593.192.600,00	593.192.600,00	0,00	Sesuai	1
42	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	89.859.000,00	89.859.000,00	0,00	Sesuai	1
43	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	460.000.000,00	444.078.500,00	15.921.500,00	Tidak Sesuai	0
44	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	157.015.400,00	157.015.400,00	0,00	Sesuai	1
45	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	52.684.700,00	52.684.700,00	0,00	Sesuai	1
46	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Sesuai	1
47	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	932.787.000,00	932.787.000,00	0,00	Sesuai	1
48	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	91.454.000,00	91.454.000,00	0,00	Sesuai	1
49	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.525.324.000,00	1.525.324.000,00	0,00	Sesuai	1

50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Sesuai	1
51	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.307.024.123,00	3.802.782.796,00	(495.758.673,00)	Tidak Sesuai	0
52	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Sesuai	1
53	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.012.612.000,00	1.842.514.400,00	(829.902.400,00)	Tidak Sesuai	0
54	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.330.605.000,00	3.930.605.000,00	(600.000.000,00)	Tidak Sesuai	0
55	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	297.260.928.191,00	297.678.318.191,00	(417.390.000,00)	Tidak Sesuai	0
56	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.634.850.050,00	1.634.850.050,00	0,00	Sesuai	1
57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	129.893.121.280,00	136.086.920.280,00	(6.193.799.000,00)	Tidak Sesuai	0
58	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	388.407.000,00	538.407.000,00	(150.000.000,00)	Tidak Sesuai	0
59	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Sesuai	1
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.488.392.000,00	1.488.392.000,00	0,00	Sesuai	1
61	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	11.890.200,00	5.860.600,00	6.029.600,00	Tidak Sesuai	0
62	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	Sesuai	1
63	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.969.869.050,00	7.466.742.050,00	(496.873.000,00)	Tidak Sesuai	0
64	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan	194.677.000,00	194.677.000,00	0,00	Sesuai	1

	KEMANDIRIAN PANGAN					
65	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Sesuai	1
66	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	66.642.000,00	66.642.000,00	0,00	Sesuai	1
67	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	536.664.000,00	122.805.000,00	413.859.000,00	Tidak Sesuai	0
68	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	921.000.000,00	829.060.000,00	91.940.000,00	Tidak Sesuai	0
69	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	Sesuai	1
70	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.450.000.000,00	1.448.241.160,00	1.758.840,00	Tidak Sesuai	0
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.628.352.000,00	1.678.334.000,00	(49.982.000,00)	Tidak Sesuai	0
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	396.350.000,00	396.350.000,00	0,00	Sesuai	1
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	224.941.050,00	224.941.050,00	0,00	Sesuai	1
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	503.066.000,00	453.066.000,00	50.000.000,00	Tidak Sesuai	0
75	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	114.710.500,00	114.710.500,00	0,00	Sesuai	1
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	383.525.400,00	383.525.400,00	0,00	Sesuai	1
77	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.599.720.315,00	1.599.720.315,00	0,00	Sesuai	1
78	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.352.595.000,00	1.368.595.000,00	(16.000.000,00)	Tidak Sesuai	0
79	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	199.837.000,00	1.199.837.000,00	(1.000.000.000,00)	Tidak Sesuai	0

80	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	63.402.000,00	112.402.000,00	(49.000.000,00)	Tidak Sesuai	0
81	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	Sesuai	1
82	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	285.895.000,00	285.895.000,00	0,00	Sesuai	1
83	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	762.195.700,00	750.395.700,00	11.800.000,00	Tidak Sesuai	0
84	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	434.900.000,00	434.900.000,00	0,00	Sesuai	1
85	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	153.866.200,00	163.866.200,00	(10.000.000,00)	Tidak Sesuai	0
86	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	346.149.000,00	346.149.000,00	0,00	Sesuai	1
87	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	74.385.000,00	74.385.000,00	0,00	Sesuai	1
88	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	172.050.000,00	172.050.000,00	0,00	Sesuai	1
89	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	220.925.000,00	220.925.000,00	0,00	Sesuai	1
90	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	33.216.000,00	33.216.000,00	0,00	Sesuai	1
91	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	Sesuai	1
92	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	292.434.000,00	703.434.000,00	(411.000.000,00)	Tidak Sesuai	0

	KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
93	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	44.342.000,00	44.342.000,00	0,00	Sesuai	1
94	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.075.350.000,00	1.150.350.000,00	(75.000.000,00)	Tidak Sesuai	0
95	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	53.960.000,00	155.101.500,00	(101.141.500,00)	Tidak Sesuai	0
96	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	14.788.144.468,00	14.788.144.468,00	0,00	Sesuai	1
97	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	222.200.000,00	222.200.000,00	0,00	Sesuai	1
98	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.544.786.117,00	3.457.946.117,00	86.840.000,00	Tidak Sesuai	0
99	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.343.229.450,00	5.338.129.450,00	5.100.000,00	Tidak Sesuai	0
100	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Sesuai	1
101	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Sesuai	1
102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	663.739.393.063,00	660.045.857.983,00	3.693.535.080,00	Tidak Sesuai	0

	KABUPATEN/KOTA					
103	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	421.317.850,00	421.317.850,00	0,00	Sesuai	1
104	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.023.008.250,00	1.842.930.250,00	(819.922.000,00)	Tidak Sesuai	0
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	78.626.949.228,00	95.563.379.365,00	(16.936.430.137,00)	Tidak Sesuai	0
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	622.288.125,00	622.288.125,00	0,00	Sesuai	1
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.244.718.000,00	3.341.631.633,00	(96.913.633,00)	Tidak Sesuai	0
108	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	867.175.000,00	867.175.000,00	0,00	Sesuai	1
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	120.145.200,00	120.145.200,00	0,00	Sesuai	1
110	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	160.350.000,00	160.350.000,00	0,00	Sesuai	1
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	76.032.000,00	76.032.000,00	0,00	Sesuai	1
112	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	818.016.202,00	818.016.202,00	0,00	Sesuai	1
113	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	43.184.000,00	43.184.000,00	0,00	Sesuai	1
114	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	39.317.000,00	39.317.000,00	0,00	Sesuai	1
115	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.710.380.950,00	1.834.980.950,00	(124.600.000,00)	Tidak Sesuai	0
116	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.909.792.100,00	1.909.792.100,00	0,00	Sesuai	1
117	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	431.000.000,00	499.940.000,00	(68.940.000,00)	Tidak Sesuai	0

118	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	398.300.000,00	398.300.000,00	0,00	Sesuai	1
119	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Sesuai	1
120	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.046.643.700,00	996.643.700,00	50.000.000,00	Tidak Sesuai	0
121	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	558.687.106,00	1.308.687.106,00	(750.000.000,00)	Tidak Sesuai	0
122	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	9.546.000,00	9.546.000,00	0,00	Sesuai	1
123	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	562.627.000,00	562.627.000,00	0,00	Sesuai	1
124	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	16.606.400,00	16.606.400,00	0,00	Sesuai	1
125	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	205.275.000,00	205.275.000,00	0,00	Sesuai	1
126	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	Sesuai	1
127	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	18.936.000,00	18.936.000,00	0,00	Sesuai	1
128	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	167.659.800,00	317.659.800,00	(150.000.000,00)	Tidak Sesuai	0
129	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	635.290.400,00	635.290.400,00	0,00	Sesuai	1
130	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	Sesuai	1
131	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	Sesuai	1

4. Kesesuaian pagu program KUA PPAS dan APBD

Penentuan skor kesesuaian antara kesesuaian jumlah pagu per program KUA PPAS dan APBD adalah dengan menjumlahkan skor masing masing pagu per program yang sesuai dan yang tidak sesuai selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program formulasi untuk penentuan skor adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor} = \frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

Kesesuaian pagu KUA PPAS dan APBD ditahun 2023 dimana pagu KUA PPAS dan APBD dapat dilihat pada table sebagai berikut :

No	Program	Pagu KUA PPAS (Rp)	Pagu APBD (Rp)	Selisih	Penentuan Skor		
					Sesuai	1	
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.978.457.800,00	1.978.457.800,00	-	Sesuai	1	Jumlah yang sesuai = 131 Jumlah yang tidak sesuai = 0 Jumlah Program = 131 Skor : 131/131 =1
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.656.208.800,00	19.656.208.800,00	-	Sesuai	1	
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	168.376.000,00	168.376.000,00	-	Sesuai	1	
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.834.052.100,00	1.834.052.100,00	-	Sesuai	1	
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.212.352.000,00	2.212.352.000,00	-	Sesuai	1	
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.334.015.900,00	1.334.015.900,00	-	Sesuai	1	
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	666.241.088,00	666.241.088,00	-	Sesuai	1	
8	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47.688.000,00	47.688.000,00	-	Sesuai	1	
9	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	273.709.000,00	273.709.000,00	-	Sesuai	1	
10	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	278.764.000,00	278.764.000,00	-	Sesuai	1	
11	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	189.199.000,00	189.199.000,00	-	Sesuai	1	
12	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	104.270.000,00	104.270.000,00	-	Sesuai	1	
13	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	104.850.100,00	104.850.100,00	-	Sesuai	1	
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	98.725.000,00	98.725.000,00	-	Sesuai	1	

	ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.360.714.750,00	2.360.714.750,00	-	Sesuai	1
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	82.987.800,00	82.987.800,00	-	Sesuai	1
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	596.093.886,00	596.093.886,00	-	Sesuai	1
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.404.362.855,00	2.404.362.855,00	-	Sesuai	1
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	270.300.000,00	270.300.000,00	-	Sesuai	1
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	99.827.400,00	99.827.400,00	-	Sesuai	1
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.091.470.000,00	2.091.470.000,00	-	Sesuai	1
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	902.290.000,00	902.290.000,00	-	Sesuai	1
23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	758.583.241,00	758.583.241,00	-	Sesuai	1
24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	69.000.000,00	69.000.000,00	-	Sesuai	1
25	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.966.288.400,00	3.966.288.400,00	-	Sesuai	1
26	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	679.701.500,00	679.701.500,00	-	Sesuai	1
27	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	48.806.000,00	48.806.000,00	-	Sesuai	1
28	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	61.531.000,00	61.531.000,00	-	Sesuai	1
29	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	65.833.670.136,00	65.833.670.136,00	-	Sesuai	1

30	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.594.127.830,00	6.594.127.830,00	-	Sesuai	1
31	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	279.100.000,00	279.100.000,00	-	Sesuai	1
32	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	109.324.600,00	109.324.600,00	-	Sesuai	1
33	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	33.000.000,00	33.000.000,00	-	Sesuai	1
34	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.839.400.600,00	1.839.400.600,00	-	Sesuai	1
35	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.537.112.283,00	3.537.112.283,00	-	Sesuai	1
36	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	412.485.000,00	412.485.000,00	-	Sesuai	1
37	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	50.184.000,00	50.184.000,00	-	Sesuai	1
38	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	126.500.100,00	126.500.100,00	-	Sesuai	1
39	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	785.914.200,00	785.914.200,00	-	Sesuai	1
40	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	564.875.100,00	564.875.100,00	-	Sesuai	1
41	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	593.192.600,00	593.192.600,00	-	Sesuai	1
42	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	89.859.000,00	89.859.000,00	-	Sesuai	1
43	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	444.078.500,00	444.078.500,00	-	Sesuai	1
44	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	157.015.400,00	157.015.400,00	-	Sesuai	1
45	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	52.684.700,00	52.684.700,00	-	Sesuai	1
46	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.000.000,00	27.000.000,00	-	Sesuai	1
47	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	932.787.000,00	932.787.000,00	-	Sesuai	1
48	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	91.454.000,00	91.454.000,00	-	Sesuai	1
49	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.525.324.000,00	1.525.324.000,00	-	Sesuai	1
50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	600.000.000,00	600.000.000,00	-	Sesuai	1

51	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.802.782.796,00	3.802.782.796,00	-	Sesuai	1
52	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	66.000.000,00	66.000.000,00	-	Sesuai	1
53	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.842.514.400,00	1.842.514.400,00	-	Sesuai	1
54	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.930.605.000,00	3.930.605.000,00	-	Sesuai	1
55	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	297.678.318.191,00	297.678.318.191,00	-	Sesuai	1
56	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.634.850.050,00	1.634.850.050,00	-	Sesuai	1
57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	136.086.920.280,00	136.086.920.280,00	-	Sesuai	1
58	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	538.407.000,00	538.407.000,00	-	Sesuai	1
59	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	60.000.000,00	60.000.000,00	-	Sesuai	1
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.488.392.000,00	1.488.392.000,00	-	Sesuai	1
61	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5.860.600,00	5.860.600,00	-	Sesuai	1
62	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.700.000,00	5.700.000,00	-	Sesuai	1
63	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.466.742.050,00	7.466.742.050,00	-	Sesuai	1
64	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	194.677.000,00	194.677.000,00	-	Sesuai	1
65	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25.000.000,00	25.000.000,00	-	Sesuai	1
66	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	66.642.000,00	66.642.000,00	-	Sesuai	1
67	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	122.805.000,00	122.805.000,00	-	Sesuai	1
68	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	829.060.000,00	829.060.000,00	-	Sesuai	1
69	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	119.000.000,00	119.000.000,00	-	Sesuai	1
70	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.448.241.160,00	1.448.241.160,00	-	Sesuai	1
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.678.334.000,00	1.678.334.000,00	-	Sesuai	1

72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	396.350.000,00	396.350.000,00	-	Sesuai	1
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	224.941.050,00	224.941.050,00	-	Sesuai	1
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	453.066.000,00	453.066.000,00	-	Sesuai	1
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	114.710.500,00	114.710.500,00	-	Sesuai	1
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	383.525.400,00	383.525.400,00	-	Sesuai	1
77	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.599.720.315,00	1.599.720.315,00	-	Sesuai	1
78	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.368.595.000,00	1.368.595.000,00	-	Sesuai	1
79	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.199.837.000,00	1.199.837.000,00	-	Sesuai	1
80	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	112.402.000,00	112.402.000,00	-	Sesuai	1
81	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	28.500.000,00	28.500.000,00	-	Sesuai	1
82	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	285.895.000,00	285.895.000,00	-	Sesuai	1
83	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	750.395.700,00	750.395.700,00	-	Sesuai	1
84	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	434.900.000,00	434.900.000,00	-	Sesuai	1
85	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	163.866.200,00	163.866.200,00	-	Sesuai	1
86	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	346.149.000,00	346.149.000,00	-	Sesuai	1
87	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	74.385.000,00	74.385.000,00	-	Sesuai	1

88	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	172.050.000,00	172.050.000,00	-	Sesuai	1
89	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	220.925.000,00	220.925.000,00	-	Sesuai	1
90	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	33.216.000,00	33.216.000,00	-	Sesuai	1
91	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	77.000.000,00	77.000.000,00	-	Sesuai	1
92	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	703.434.000,00	703.434.000,00	-	Sesuai	1
93	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	44.342.000,00	44.342.000,00	-	Sesuai	1
94	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.150.350.000,00	1.150.350.000,00	-	Sesuai	1
95	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	155.101.500,00	155.101.500,00	-	Sesuai	1
96	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	14.788.144.468,00	14.788.144.468,00	-	Sesuai	1
97	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	222.200.000,00	222.200.000,00	-	Sesuai	1
98	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.457.946.117,00	3.457.946.117,00	-	Sesuai	1
99	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.338.129.450,00	5.338.129.450,00	-	Sesuai	1
100	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Sesuai	1
101	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	Sesuai	1
102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	660.045.857.983,00	660.045.857.983,00	-	Sesuai	1
103	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	421.317.850,00	421.317.850,00	-	Sesuai	1

104	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.842.930.250,00	1.842.930.250,00	-	Sesuai	1
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	95.563.379.365,00	95.563.379.365,00	-	Sesuai	1
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	622.288.125,00	622.288.125,00	-	Sesuai	1
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.341.631.633,00	3.341.631.633,00	-	Sesuai	1
108	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	867.175.000,00	867.175.000,00	-	Sesuai	1
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	120.145.200,00	120.145.200,00	-	Sesuai	1
110	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	160.350.000,00	160.350.000,00	-	Sesuai	1
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	76.032.000,00	76.032.000,00	-	Sesuai	1
112	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	818.016.202,00	818.016.202,00	-	Sesuai	1
113	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	43.184.000,00	43.184.000,00	-	Sesuai	1
114	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	39.317.000,00	39.317.000,00	-	Sesuai	1
115	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.834.980.950,00	1.834.980.950,00	-	Sesuai	1
116	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.909.792.100,00	1.909.792.100,00	-	Sesuai	1
117	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	499.940.000,00	499.940.000,00	-	Sesuai	1
118	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	398.300.000,00	398.300.000,00	-	Sesuai	1
119	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Sesuai	1
120	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	996.643.700,00	996.643.700,00	-	Sesuai	1
121	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.308.687.106,00	1.308.687.106,00	-	Sesuai	1
122	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	9.546.000,00	9.546.000,00	-	Sesuai	1

123	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	562.627.000,00	562.627.000,00	-	Sesuai	1
124	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	16.606.400,00	16.606.400,00	-	Sesuai	1
125	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	205.275.000,00	205.275.000,00	-	Sesuai	1
126	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	51.900.000,00	51.900.000,00	-	Sesuai	1
127	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	18.936.000,00	18.936.000,00	-	Sesuai	1
128	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	317.659.800,00	317.659.800,00	-	Sesuai	1
129	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	635.290.400,00	635.290.400,00	-	Sesuai	1
130	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	108.000.000,00	108.000.000,00	-	Sesuai	1
131	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	51.000.000,00	51.000.000,00	-	Sesuai	1

Selanjutnya berdasarkan skor masing masing indicator diatas, maka hasil pengukuran indek kesesuaian dokumen dan penganggaran diperoleh dengan formula sebagai berikut :

$$\text{indeks} = \text{skor rata rata} \times \text{bobot}$$

Dengan bobot yang diberikan untuk kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah 15. Jadi untuk indek kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada table berikut :

Table 3.1

Pengukuran indeks kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

No	Indikator	Skor	Skor rata rata	indeks
1	Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS	1	$= \frac{1 + 1 + 0.610 + 1}{4}$ $= 0.91$	$= 0.91 \times 15$ $= 13.65$
2	Kesesuain nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD	1		
3	Kesesuaian pagu RKPD dan KUA PPAS	0.610		
4	Kesesuaian pagu program KUA PPAS dan APBD	1		

Jadi pengukuran dokumen perencanaan dan penganggaran ditahun 2023 adalah 13.65 point yang mana target BPKAD ditahun 2023 adalah 8.08 point.

3.4.3 Sasaran 3 Pemenuhan alokasi anggaran belanja dalam APBD

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD adalah salah satu yang diukur dalam indek pengelolaan keuangan daerah dimana dalam pengukuran skor pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memiliki beberapa indicator dimana setiap skor indicator dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah indicator. Skor pengalokasi anggaran belanja dalam APBD dapat dilihat pada table berikut :

No	Indikator	Fomula	Skor	Skor rata rata	Indeks
1	Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD	$= \frac{\text{jumlah fungsi pendidikan}}{\text{Jumlah belanja Kabupaten}} \times 100 \%$ $= \frac{449.232.050.816}{1.395.535.691.960}$ $= 0.33 \times 100\%$	1	$= \frac{1 + 1 + 0 + 1}{4}$ $= 0.75$	$= 0.75 \times 20$ $= 15$

		= 32.19 %		
2	Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% dari APBD di luar gaji	$= \frac{\text{anggaran kesehatan}}{\text{Total belanja daerah diluar gaji ASN}} \times 100\%$ $= \frac{203.712.701.452}{1.395.535.691.960}$ $= 0.15 \times 100\%$ $= 19.69 \%$	1	
3	Alokasi jumlah belanja infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar 25 % dari dana transfer umum	$= \frac{\text{belanja modal} + \text{belanja pemeliharaan} + \text{belanja hibah} + \text{belanja bantuan keuangan}}{\text{Total Dana Transfer}}$ $= \frac{215.742.865.607}{1.188.000.000}$ $= 18.56 \%$	0	
4	Alokasi belanja untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SPM Pendidikan = 19.407.965.350 SPM Kesehatan = 4.186.756.550 SPM PU dan tata ruang = 4.402.782.796 SPM perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman = 1.316.845.000 SPM ketentraman dan ketertiban umum = 5.748.025.000 SPM Sosial = 490.500.000	1	

Catatan : apabila indicator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undang diberikan skor 1 sebaliknya apabila indicator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undang diberikan skor 0.

Jadi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD ditahun 2023 memiliki point 15 dimana target BPKAD ditahun 2023 adalah 15 Point.

Untuk mencapai target dari dua Indikator tersebut ,maka dilaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	60,36	60,36
2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2.Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	1, 8,08 2, 15	1, 13,65 2, 15
3	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen
7	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen
8	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen
9	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	3 Dokumen
10	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen
11	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen

12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
----	--	---	-----------	-----------

3.4.4 Sasaran meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

3.4.4.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Bidang Akuntansi)

Bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang dan melaksanakan dukungan teknis bidang akuntansi. Terlaksananya ketugasan tersebut bidang Akuntansi melaksanakan 1 program yang memiliki 1 indikator kinerja sebagai hasil/*outcome* dari program tersebut. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu :

Indikator	Formula	TARGET 2023
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Point = skor x bobot	WTP (15)

Pemberian opini atas laporan LKPD dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan peraturan perundang undangan. Untuk memberikan opini atas LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, system pengendalian internal, dan ketaatan perundang undang. Berdasarkan hasil opini BPK RI Kabupaten Way Kanan telah meraih WTP dari tahun 2010 sampai 2022 atau Kabupaten Way Kanan selama 3 tahun terakhir secara berturut turut memperoleh opini WTP. Point Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan dapat dilihat pada table berikut :

No	Indikator	Skor	Skor rata rata	Indeks
1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	1	= 1 x 15 = 15	15

--	--	--	--	--

Untuk mencapai target dari Indikator Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Indikator Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan

No	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	60,36	60,36
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)	15	15
3	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan
4	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen
5	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	16 Laporan
6	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	7 Laporan

7	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
8	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	15 Dokumen	15 Dokumen
9	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
10	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	5 Dokumen
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	14 Orang	14 Orang

3.4.4.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Pengelolaan Barang Daerah (Bidang Aset)

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan dukungan teknis penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan tujuan dari program pengelolaan barang milik daerah adalah menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terwujudnya akuntabilitas, ketertiban, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah. Selain itu pengelolaan barang milik daerah mempunyai peran yang penting sebagai salah satu unsur penilaian opini pemeriksaan BPK bidang Aset melaksanakan 1 program yang memiliki

satu indikator kinerja sebagai hasil/*outcome* dari program tersebut. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu :

Indikator	Formula	2023
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Selisih antara jumlah asset per 31 desember dengan jumlah asset hasil audit BPK dibagi jumlah asset hasil audit BPK x 100%	100

Capaian akurasi data barang milik daerah yang telah diaudit oleh BPK yaitu sebagai berikut :

Data BMD Tahun 2023 dan 2022

No	Jenis aset	KIB	Data Aset		Selisih	Persen
			Tahun 2023 Unaudit	Tahun 2022 Audit		
1	Tanah	A	107.877.389.622,00	107.877.389.622,00	-	100,00
2	Peralatan dan Mesin	B	478.865.604.470,24	447.081.196.563,24	31.784.407,907,00	93,36
3	Gedung dan Bangunan	C	824.574.013.786,84	806.272.894.895,32	18.301.118,891,52	97,78
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	D	2.727.897.738.801,96	2.670.792.082.709,94	57.105.656,092,02	97,91
5	Aset Tetap lainnya	E	70.057.887.900,00	69.535.590.775,00	522.297.125,00	99,25
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	F	8.024.587.449,00	8.024.587.449,00	-	100,00
7	Akumulasi Penyusutan		(2.082.544.065.887,50)	(2.082.544.065.887,50)	-	100,00
	Jumlah		2.134.753.156.142,54	2.027.039.676.127,00	107.713.480.015,54	94,95

Tahun 2022 data aset yang disajikan pada neraca setelah diaudit BPK RI terdapat selisih sebesar Rp. 107.713.480.015,54 dengan persentase 94,95 % dari data aset yang dihimpun oleh bidang aset BPKAD. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa transaksi yang

bertambah dalam aplikasi oleh SKPD dari sekolah baik pada KIB B, serta beberapa penghapusan sebagian yang belum dientry dalam aplikasi oleh SKPD dan sekolah.

Untuk mencapai target dari Indikator Cakupan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Indikator Cakupan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah

No	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	15	15
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertibnya administrasi barang milik daerah	16	16
3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan
7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan
8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	6 Laporan
9	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan

3.4.5 Meningkatkan Penyerapan Anggaran

Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Pengendalian Belanja Daerah (Bidang Perbendaharaan)

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang dan melaksanakan dukungan teknis bidang perbendaharaan. Terlaksananya ketugasan tersebut bidang perbendaharaan melaksanakan 1 program yang memiliki 2 indikator kinerja sebagai hasil/*outcome* dari program tersebut. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu :

Indikator	Formula	TARGET 2023
Skor Penyerapan Anggaran (point)	Point = skor rata rata x bobot	14
Skor Kondisi Keuangan Daerah (point)	Point = nilai actual – nilai minimum / nilai maksimum – nilai minimum	0.2

Skor penyerapan anggaran

Penentuan skor masing masing indicator untuk penyerapan anggran adalah persentase antara anggaran belanja dan realisasinya. Apabila persentasenya antara anggaran belanja dengan realisasinya mencapai sama atau diatas 80% maka skor diberi angka 1 dan sebaliknya apabila persentasenya kurang dari 80% maka skor yang diberikan adalah 0.

Ada pun realisasi belanja kab. Way kanan tertuang pada table sebagai berikut :

No	Indikator	Anggaran	Realisasi	Persentase	Skor	Skor rata rata	Indek
1	Penyerapan anggaran belanja pegawai	549.248.155.110,00	538.314.118.862,00	98,01	1	=1+1+1+1+0+1+1	=0.857*20
2	Penyerapan anggaran belanja hibah	45.694.137.300,00	45.101.927.457,00	98,70	1	7	=17.14
3	Penyerapan anggaran belanja bantuan sosial	105.000.000,00	105.000.000,00	100	1	=0.857	
4	Penyerapan anggaran belanja	293.976.324.765,00	290.062.333.114,26	98,67	1		

	bagi hasil dan bantuan keuangan						
5	Penyerapan anggaran belanja tidak terduga	700.000.000,00	257.796.125,00	36,83	0		
6	Penyerapan anggaran barang dan jasa	385.065.512.432,00	365.468.848.118,86	94,91	1		
7	Penyerapan anggaran belanja modal	120.746.562.353,00	107.713.480.015,54	89,21	1		

Dari hasil perhitungan skor penyerapan anggaran yang realisasinya ditahun 2023 adalah 17.14 dengan target 14.

3.4.6 Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik

Skor Kondisi Keuangan Daerah

Secara umum, kondisi keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai kemampuan suatu pemerintah dalam memenuhi kewajibannya baik dalam bentuk utang atau pemenuhan layanan secara berkelanjutan dan tepat waktu. Dalam menghitung skor kondisi keuangan diperlukan data dan informasi kondisi keuangan daerah, data tersebut dapat dilihat ditabel sebagai berikut :

No	Akun	Nilai
1	Kas di Kas Daerah	16.145.374.260,67
2	investasi JK pendek	0
3	Kewajiban lancar	50.752.497.320,02
4	Total aset tetap	2.134.753.156.142,54
5	kewajiban jangka panjang	0,00
6	Total kewajiban	50.752.497.320,02
7	total pendapatan	1.335.031.575.065,75
8	Pendapatan Dak	283.458.460.380,00
9	Belanja Pegawai	538.314.118.862,00
10	Total PAD	79.442.552.185,75
11	total pendapatan LO	1.102.927.021.056,75
12	Total Beban LO	1.047.447.934.387,46
13	DAK LO	283.458.460.380,00
14	Jumlah Penduduk	483.884,00

Dari table diatas skor kondisi keuangan daerah dapat dilihat pada table dibawah ini dengan perhitungan rasio sebagai berikut :

$$\text{Indek Rasio} = \frac{\text{nilai} - \text{nilai min}}{\text{nilai max} - \text{nilai min}}$$

N o	Indikator	Rumus	Nilai	Indek Rasio
1	Kemandirian keuangan Min = 0,167 Max = 0,686	Total PAD / total pendapatan	0,060	-0,207
2	Fleksibilitas keuangan Min = 2,194 Max = 7,932	(total pendapatan- DAK)/total kewajiban+belanja pegawai)	1,785	-0,071
3	Solvabilitas operasional Min = 0,787 Max = 4,026	(total pendapatan LO- pendapatan DAK LO)/total beban LO	0,782	-0,001
4	Solvabilitas JK pendek Min = 0,031 Max = 15,027	(kas dan setara kas+investasi jangka pendek)/kewajiban lancar	0,318	0,019
5	Solvabilitas jangka panjang Min = 86,236 Max = 27849490579767,700	Total asset tetap/kewajiban jangka panjang	2.134.75 3.156.14 2,54	0,077
6	Solvabilitas layanan Min = 354291,965 Max = 33926021,704	Total asset tetap/jumlah penduduk	4.358.65 8	0,119

Jadi indek kondisi keuangan daerah adalah =

$$\text{Indek} = \frac{-0,207 + -0,071 + -0,001 + 0,019 + 0,077 + 0,119}{6}$$

$$= -0.011$$

$$\begin{aligned} \text{Rumus IKK} &= \text{indek} \times \text{Bobot (bobot 15)} \\ &= -0.011 \times 15 \\ &= -0.16 \end{aligned}$$

Untuk mencapai target dari Sasaran Meningkatkan Penyerapan Anggaran dan Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	60,36	60,36
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Skor Penyerapan Anggaran (point) 2. Skor Kondisi Keuangan Daerah (point)	1, 14 2, 0,2	1, 17.14 2, 0.16
3	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen
4	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen
5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	2 Laporan

7	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen
8	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Laporan	3 Laporan
9	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga, Hibah dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	6	6
10	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Laporan	3 Laporan
11	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan
12	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan

3.4.7 Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah **Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Transparansi** **pengelolaan keuangan Daerah (UPT TI)**

Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup 2 indikator yakni ketepatan waktu dalam laporan dan keteraksesan laporan tersebut. Dalam mengukur atas ketepatan waktu dan keterkasesan dilakukan terhadap beberapa dokumen, adapapun dokumen tersebut dapat dilihat ditabel sebagai berikut :

No	Dokumen	Tanggal penetapan	Tanggal Unggah	RW	BAU	S/TS	Nilai	Keteraksesan	Jumlah
1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD	07/07/2023	11/07/2023	4	30	S	1	1	1,00
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran	04/08/2022	16/08/2022	12	30	S	1	1	1,00
3	informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran	04/08/2022	16/08/2022	12	30	S	1	1	1,00
4	informasi ringkasan dokumen RKA SKPD	04/08/2022			30	S	1	0	1,00
5	informasi ringkasan dokumen RKA PPKD	04/08/2022			30	S	1	0	1,00
6	Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD	07/09/2022	10/09/2022	3	30	S	1	1	1,00
7	informasi peraturan daerah tentang APBD	22/12/2022	27/12/2022	5	30	S	1	1	1,00
8	Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	22/12/2022	27/12/2022	5	30	S	1	1	1,00
9	informasi ringkasan DPA SKPD	03/01/2023	04/01/2023	1	30	S	1	1	1,00
10	informasi DPA PPKD	03/01/2023	04/01/2023	1	30	S	1	1	1,00
11	informasi realisasi pendapatan daerah	03/05/2024	04/01/2023	1	30	S	1	1	1,00
12	informasi realisasi belanja belanja daerah	03/05/2024	04/01/2023	1	30	S	1	1	1,00
13	informasi realisasi pembiayaan daerah	03/05/2024	04/01/2023	1	30	S	1	1	1,00
14	informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD	11/09/2023	15/09/2023	4	30	S	1	1	1,00
15	informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD	05/10/2023	10/10/2023	5	30	S	1	1	1,00
16	informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	05/10/2023	10/10/2023	5	30	S	1	1	1,00
17	informasi ringkasan RKA perubahan APBD	10/08/2023			30	TS	1	0	0,00
18	informasi rencana umum pengadaan				30	TS	0	0	0,00
19	informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelolaan keuangan daerah	18/04/2023	17/04/2023	1	30	S	1	1	1,00
20	informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi	07/02/2023	09/02/2023	2	30	S	1	1	1,00
21	informasi laporan arus kas	03/05/2024	07/05/2024	4	30	S	1	1	1,00

22	informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD	03/05/2024	07/05/2024	4	30	S	1	1	1,00	
23	informasi laporan realisasi anggaran PPKD	03/05/2024	07/05/2024	4	30	S	1	1	1,00	
24	informasi Neraca	03/05/2024	07/05/2024	4	30	S	1	1	1,00	
25	informasi CALK pemerintah Daerah	03/05/2024	07/05/2024	4	30	S	1	1	1,00	
26	informasi laporan keuangan BUMD/pemerintah daerah	03/05/2024	07/05/2024	4	30	S	1	1	0,50	
27	informasi laporan akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah				30	TS	0	0	0,00	
28	informasi penetapan perdapertanggungjawaban pelaksanaan APBD	03/05/2024	07/05/2024	4	30	S	1	1	1,00	
29	infomasi opini BPK	03/05/2024	07/05/2024	4	30	S	1	1	1,00	
							Total	27	24	39,00
							rata rata	0,93	0,83	1,76

Berdasarkan uraian diatas, maka pengukuran skor transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada table sebagai berikut :

No	Indikator	Skor	Skor rata rata	Indeks
1	Ketepatan waktu	= 27 / 29 = 0.93	= $\frac{0.93 + 0.83}{2}$	= 0.88 x 15 = 13.19
2	Keteraksesan	= 24 / 29 = 0.83	= 0.88	

Untuk mencapai target dari Indikator transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	5	6	8	9
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	60,36	74.14
2	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	skor transparansi pengelolaan keuangan daerah	8,08	13.19

3	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
5	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	46 orang/SKPD	46 orang/SKPD

Pengukuran indeks pengelolaan keuangan dan asset daerah (IPKD) dengan menjumlahkan keseluruhannya, hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada table berikut ini :

NO	INDIKATOR	INDEK	TOTAL INDEK
1	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	13.65	$= 13.65 + 15 + 13.19 + 17.14 + 0.16 + 15$ $= 74.14$
2	Pengalokasian anggaran belanja daerah	15	
3	Transparasi pengelolaan keuangan daerah	13.19	
4	Penyerapan anggaran	17.14	
5	Kondisi keuangan daerah	0.16	
6	Opini BPK	15	

3.5 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

BPKAD Kabupaten Way Kanan telah menetapkan 7 sasaran yang ingin dicapai ditahun 2023 ini. Dari sasaran tersebut, semuanya dapat dicapai dengan hasil maksimal.

Capaian sasaran tersebut dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator sasaran sebagai berikut :

Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Way Kanan Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Taregt Kinerja Tujuan / Sasaran	
				2022	
				TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten (Point)	58,64	
		Meningkatkan Kualitas SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (point)	60,63	66.66
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	60.2	76.07
		Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (point)	8	13,08
		Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (point)	15	20
		Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	8	13.71
		Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Skor Penyerapan Anggaran (point)	14	14,28
		Menciptakan Kondisi Keuangan	Skor Kondisi Keuangan Daerah (point)	0.2	0.25

		Daerah Yang Baik			
		Meningkatkn kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)	15	15

**Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Way Kanan Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN	
				TARGET	REALISASI
-1	-2	-3	-4	-8	-9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten (Point)		
		Meningkatkan Kualitas SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (point)	61.67	Proses
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	60.36	74.14
		Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (point)	8.08	13.65

		Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (point)	15	15
		Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	8.08	13.19
		Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Skor Penyerapan Anggaran (point)	14	17.14

		Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik	Skor Kondisi Keuangan Daerah (point)	0.2	0.16
		Meningkatkn kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)	15	15

Dari kedua tabel di atas capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan skor dari tahun 2022 dan tahun 2023, adapun sasaran yang mengalami penurunan skor sebagai berikut

1. Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berkenaan dengan banyaknya Mandatory dan kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan baru dapat menganggarkan Alokasi Belanja Infrastruktur pada APBD TA 2023

Sebesar Rp. 215.742.865.607 atau 18,56% dari total APBD Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Way Kanan berupaya dapat memenuhi Belanja Infrastruktur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan Penyerapan Anggaran

Pada sasaran ini terdapat serapan anggaran yang masih dibawah 80 % antara lain belanja tidak terduga sebesar 37.29%, pada rekening belanja tidak terduga yang serapannya juga rendah dikarenakan Tidak terdapat bencana alam dan tidak terdapat pengeluaran yang mendesak yang berdampak pada realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023

3.5.1 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan kabupaten lain

No	KABUPATEN	IPKD	PERINGKAT	NILAI	Kategori Fiskal
1	Lampung Tengah	83,648	Baik	A	Rendah
2	Pringsewu	78,369	Perlu Perbaikan	B	Rendah
3	Way Kanan	77,503	Perlu Perbaikan	B	Rendah
4	Pesawaran	76,876	Perlu Perbaikan	B	Sedang
5	Lampung Selatan	76,742	Perlu Perbaikan	B	Rendah
6	Lampung Barat	74,945	Perlu Perbaikan	B	Rendah
7	Tulang Bawang Barat	73,237	Perlu Perbaikan	B	Rendah
8	Lampung Timur	67,532	Perlu Perbaikan	B	Rendah
9	Metro	76,972	Perlu Perbaikan	B	Rendah
10	Pesisir Barat	67,257	Perlu Perbaikan	B	Rendah
11	Tanggamus	64,600	Perlu Perbaikan	B	Sedang
12	Mesuji	59,145	Perlu Perbaikan	B	Tinggi
13	Lampung Utara	57,860	Sangat Perlu Perbaikan	C	Rendah
14	Tulang Bawang	56,690	Sangat Perlu Perbaikan	C	Sedang
15	Bandar Lampung	39,717	Sangat Perlu Perbaikan	C	Rendah

Sumber Data. BAPEDA

Pada tahun 2023 untuk indek pengelolaan keuangan daerah (IPKD) tahun 2022 yang hasil peniliannya di tahun 2023 masih masuk dalam klaster perlu perbaikan dari 15 kabupaten / Kota diprovinsi lampung dengan point 77.503 dan point tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022 kabupaten Way Kanan memiliki point 78.0458 adapun penyebab penurunan point tersebut disebabkan antara lain :

1. Ada 60 (22,1%) Program dari 271 Program tidak sesuai antara RKPD dan KUAPPAS.
2. Adanya Ketidaksesuaian Pagu RKPD-KUPPAS sebesar 49,8% (142 Program dari 285 Program)
3. Masih Kurangnya Alokasi Anggaran Utk SPM terutama untuk SPM pada Dinas PERKIM
4. Ketepatan Waktu Publish Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Masih Kurangnya Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga, Realisasi tahun 2023 sebesar 50,61%.
6. Hampir setiap Indikator memiliki Indeks Total yang sangat rendah
7. Belum terinformasikannya dengan jelas bagaimana mekanisme formulasi, penghitungan dan pengukuran Dimensi 5

3.6 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target Akhir RPJMD

Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan sudah berusaha secara maksimal untuk mencapainya. Adapun perbandingan antara capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 dengan akhir RPJMD adalah sebagaimana tabel berikut :

Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dibandingkan dengan target Akhir RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Penjelasan / Formulasi	Satuan	TARGET 2023	REALISASI 2023	AKHIR RPJMD	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten (Point)		Point	60.64		62,64	Hasil Penilaian Menpan RB
		Meningkatkan Kualitas SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (point)	Nilai yang diberikan Inspektorat Kabupaten	Point	61.67	Proses	65,62	Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten

									en
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Point	60.36	74.14	60.6	Dokumen KUA PPA S dan APBD Tahunan Kabupaten
		Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (point)	Skor = Skor rata-rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah)	Point	8.08	13.65	8.2	Dokumen KUA PPA S

		Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (point)	Skor = Skor rata-rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah)	Point	15	15	15	Dokumen APBD Tahunan
		Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Skor = Skor rata-rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah)	Point	8.08	13.19	8.2	Dokumen APBD Tahunan dan LKPD Tahunan

		Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Skor Penyerapan Anggaran (point)	Skor = Skor rata-rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengeluaran keuangan daerah)	Point	14	17.14	14	LKP D Tahunan
		Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik	Skor Kondisi Keuangan Daerah (point)	Skor = Skor rata-rata X Bobot (Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengeluaran keuangan daerah)	Point	0.2	0.16	0.2	LKP D Tahunan

	Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)	Skor = Skor rata-rata X Bobot (Permenndagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah)	Point	15	15	15	LKPD Tahunan
--	---	---	--	-------	----	----	----	--------------

Tabel tersebut menggambarkan bahwa dari 7 Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan, dari Tujuh Indikator telah mencapai targetnya, sesuai dengan rencana target diakhir RPJMD.

3.7 Analisis Permasalahan dan Solusi kegagalan kinerja

Dalam pelaksanaan program untuk mencapai target kinerja BPKAD mendapati permasalahan dan solusi yang dapat di jelaskan sebagai berikut

No	Permasalahan	Solusi
1	Keterlambatan dalam entitas akuntansi (BLUD) dalam menyampaikan SP3B. sehingga	Perlunya sinkronisasi batas waktu penyampaian SP3B untuk menjaga komitmen entitas akuntansi (BLUD) dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada BPKAD selalu entitas pelaporan..
2	Keterbatasan SDM yang ada pada SKPD selaku entitas akuntansi, Merupakan salah satu kendala terkait kualitas data dan ketepatan waktu penyampaian data secara berkala	Perlu Membentuk tim atau task force untuk melakukan rencana aksi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan melakukan pemantauan secara rutin atas rencana aksi tersebut, rencana aksi tersebut meliputi sertifikasi SDM pengelola keuangan SKPD sesuai dg latar belakang pendidikan dan tugas terkait

		serta Memberikan bimbingan teknis guna meng upgrade SDM pengelola keuangan daerah tersebut..
3	Sulitnya berkoordinasi dengan TIM Teknis ketika ada kendala pada saat menginput anggaran maupun saat terjadi gangguan sistem maupun cetak laporan pada aplikasi SIPD di Kementerian Dalam Negeri	Perlu Menjalin Hubungan dan komunikasi yang Insentif dengan beberapa Tim Personil Teknis SIPD Kementerian dalam Negeri pada saat adanya Kendala saat Proses Penginputan Maupun Pada saat cetak laporan
4	Lambatnya dalam proses pengamanan dalam bentuk Dokumen sertifikat BUKU TANAH di Badan Pertanahan Kabupaten Way Kanan	Perlu dibuat Surat kuasa khusus Kejaksaan Negeri Way Kanan dalam pendampingan hukum, Datun Selaku Pengecara Negara
5	OPD /Satker selaku Pengguna Barang, tidak dapat menunjukan holder terhadap pengguna perseorangan sehingga terkadang tidak dapat di telusuri keberadaan Kendaraan tersebut	Perlu dibuat Surat kuasa khusus Kejaksaan Negeri Way Kanan dalam pendampingan hukum, Datun Selaku Pengecara Negara
6	Kurangnya sinergi Berkoordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran OPD sehingga pengimputan data pada aplikasi sim aset sering kali terlambat	Perlunya sosialisasi aplikasi aset

3.8 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2023, dengan sumber daya yang ada, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah dijanjikan. Definisi efisiensi adalah dengan menggunakan sumber daya yang ada, namun mampu melaksanakan kinerja dengan maksimal yang diukur dari capaian kinerja. Maka dari itu, untuk menganalisa terjadi atau tidaknya efisiensi anggaran, dilakukan pengukuran efisiensi dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan realisasi sumber daya yang digunakan. Pengukuran efisiensi sebagaimana tabel berikut:

**Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	SASARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	SELISIH
1	Meningkatkan Kualitas SAKIP OPD	100	97.56	2.44
2	Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	168	97.80	70.20
3	Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	100	97.80	2.20
4	Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	163	96.74	66.26
5	Meningkatkan Penyerapan Anggaran	122	99.90	22.10
6	Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik	100	99.90	0.10
7	Meningkatkn kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100	93.62	6.38

3.9 Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

Semua kegiatan menunjang tercapainya kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan adalah kegiatan dengan capaian output kegiatan 100% hampir semua kegiatan yang mengalami efisiensi sumber daya anggaran

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan pada tahun 2023, BPKAD Kabupaten Way Kanan pada dasarnya tidak menemui halangan dan kendala yang berarti, hanya saja ada empat sub kegiatan yang serapannya masih rendah yaitu :

1. Pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak terealisasi 37.29%. Hal ini dikarenakan Tidak terdapat bencana alam dan tidak terdapat pengeluaran yang mendesak yang berdampak pada realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023
2. Pada sub kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota terrealisasi sebesar 52.80% dikarenakan Baru terrealisasi bagi hasil pajak atas pajak daerah sebesar 60 % sedangkan Realisasi Pajak Retribusi sebesar 40% masih Menunggu perhitungan dari BAPENDA dan dituangkan dalam bentuk surat keputusan Bupati
3. Pada sub kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah terealisasi sebesar 87.51% dikarenakan Kurangnya perencanaan dalam memulai kegiatan, sehingga terdapat rekening belanja pemeliharaan komputer dan jaringan yang realisasinya masih rendah dikarenakan pada waktu pembelian perangkat jaringan harganya tidak mencukupi yang sudah di anggarankan
4. Pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang realisasinya masih 67.36% dikarenakan Honorarium Majelis TPTGR tidak diambil semua. Dikarenakan tidak sesuai dengan SSH honorarium TPTGR. Sehingga pengambilan honorarium hanya berdasarkan Pelaksana Kegiatan saja.

3.10 REALISASI ANGGARAN

BAB IV

PENUTUP

4.1. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan manifestasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Laporan sebagai Akuntabilitas merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kab. Way Kanan.

Secara umum dari misi yang telah ditetapkan telah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan, keberhasilan ini juga telah didukung penuh oleh seluruh anggota organisasi.

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan terutama dalam menganalisa kinerja organisasi. Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah kab. Way Kanan sangat diperlukan sehingga implementasi sistem LKJ diharapkan akan lebih baik dimasa mendatang.

4.2. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Secara umum dari kinerja terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan, keberhasilan ini juga telah didukung penuh oleh seluruh anggota organisasi dan untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa mendatang maka diperlukan strategi ;

1. Peningkatan peraturan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan asset;
3. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui daya dukung sarana dan prasarana penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompeten yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan dan asset;

5. Peningkatan pelayanan yang mendukung dengan sarana dan prasarana yang berbasis sistem informasi.

Way Kanan, Februari 2023
Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan aset
Daerah Kabupaten Way Kanan

Kusuma Anakori, SE, M. A.P
NIP. 19720426 200003 2 002